

## KEBUTUHAN, KESERAKAHAN DAN RENDAHNYA SUPREMASI HUKUM SEBAGAI FAKTOR PENENTU PERILAKU KORUPSI APARATUR PEMERINTAH

**Rahman Pura, Sahidah**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

Email: [rahmanpura@stiem-bongaya.ac.id](mailto:rahmanpura@stiem-bongaya.ac.id), [sahidahsuardi@gmail.com](mailto:sahidahsuardi@gmail.com)



©2025 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of needs, greed and low supremacy of law on corrupt behavior. The study was conducted on government officials in Makassar City. This study used a quantitative survey approach, collecting data from 93 respondents using a structured questionnaire. The data were analyzed using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS).*

*The findings of the study indicate that needs, greed and low supremacy of law have a significant effect on corrupt behavior.*

*The results of this study have important implications for efforts to prevent and overcome corruption. The government and related institutions need to pay attention to the needs of the community, especially economic needs, and provide strict punishment or sanctions for perpetrators of corruption to reduce the possibility of corruption.*

**Keywords:** *Needs, Greed, Low supremacy of law, and Corruption behavior.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supremasi hukum terhadap perilaku korupsi. Penelitian dilakukan pada aparatur pemerintah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei kuantitatif, dengan pengumpulan data dari 93 responden menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling dengan Partial Least Squares (SEM-PLS).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supremasi hukum berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pemerintah dan instansi terkait perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan ekonomi, dan memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

**Kata kunci:** Kebutuhan, Keserakahan, Rendahnya supremasi hukum, dan Perilaku korupsi

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan tren korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, tersangka maupun kerugian keuangan negara dan berpotensi terus meningkat. Selanjutnya pemetaan kasus fraud berdasarkan aktor atau pelaku yang

melakukan tindakan korupsi menunjukkan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aktor terbanyak dalam melakukan tindakan korupsi (ICW,2024). Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Farooq et al., 2013), selain itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, kehilangan aset dan kehilangan kepercayaan investor (Stamler *et al.* 2014) dan juga berdampak secara individu seperti kehilangan kepercayaan dan menurunkan reputasi pelakunya (Alfarago *et al.* 2023). Konsekuensi korupsi dapat merugikan masyarakat, ekonomi, pemerintah dan kepercayaan publik (Zimelis, 2020). Perilaku korupsi yang marak akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni; kebutuhan, keserakahan, dan moralitas. Memburuknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor internal yang berupa keserakahan atau ketamakan, gaya hidup yang konsumtif (kebutuhan yang berlebihan), pendidikan, dan moral yang rendah (Kenneth, 2024). Peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar karena korupsi dilakukan secara kolektif dan penegakkan hukum juga terlihat masih lemah (Winurini, 2017).

Kebutuhan (*needs*) adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk perilaku korupsi. Motivasi dasar perilaku korupsi adalah kebutuhan (Bauhr, 2012 ; Restya & Amaliah, 2019). Ketika individu memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak etis, termasuk korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Farooq et al. (2013) menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi ketika individu memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai, Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Jamaluddin et al.(2019) menunjukkan kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku korupsi.

Faktor kedua yang memengaruhi perilaku korupsi adalah keserakahan (*greed*). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pada diri manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya, tidak merasa puas dengan yang sedikit, tetapi ingin selalu menumpuk harta. Hakekatnya manusia memiliki sifat serakah dan tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu yang dimiliki, sehingga sifat serakah ini menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan (Budiman, 2018).

Rendahnya supremasi hukum (*exposes*) dapat mempengaruhi perilaku korupsi dengan cara memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis tanpa konsekuensi. *Exposure* adalah hukuman yang dikenakan kepada para pelaku kecurangan atau korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain (Ismatullah & Eriswanto, 2016). Salah satu penyebab dari terjadinya korupsi adalah lemahnya hukum dari Lembaga pemerintahan dan kepolisian membuat masyarakat kurang percaya lagi terhadap elit yang ada di pemerintahan (Kum, 2023). Peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar penegakkan hukum juga terlihat masih lemah (Winurini, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mungiu-Pippidi (2020) menunjukkan bahwa rendahnya supremasi hukum dapat meningkatkan korupsi dengan cara memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis tanpa konsekuensi. Pelaku korupsi apabila dikenakan hukuman atau sanksi yang ringan maka memungkinkan yang bersangkutan akan mengulangi perbuatan. Menurut (Isgiyata et al., 2018) hukuman yang rendah belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain.

Permasalahan penelitian adalah apakah kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum berpengaruh terhadap perilaku korupsi pada sektor pemerintahan. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai adalah menguji dan menganalisis pengaruh kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum terhadap perilaku korupsi pada sektor pemerintahan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey, yakni mendeskripsikan tentang keyakinan, pendapat, sikap dan perilaku masa lalu dan sekarang dari jumlah populasi besar dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut dan menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan maksud untuk menggeneralisasi sampel ke populasi (Neuman, 2014 ; Sekaran & Bougie, 2016). Desain penelitian adalah korelasional di mana peneliti menggunakan statistik korelasional untuk menggambarkan dan menjelaskan derajat atau asosiasi (hubungan) antara dua atau lebih variabel (Creswell, 2014). Penelitian ini untuk menganalisis penyebab perilaku korupsi pada lingkup pemerintah daerah dengan melakukan survei pada Aparatur Sipil Negara di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

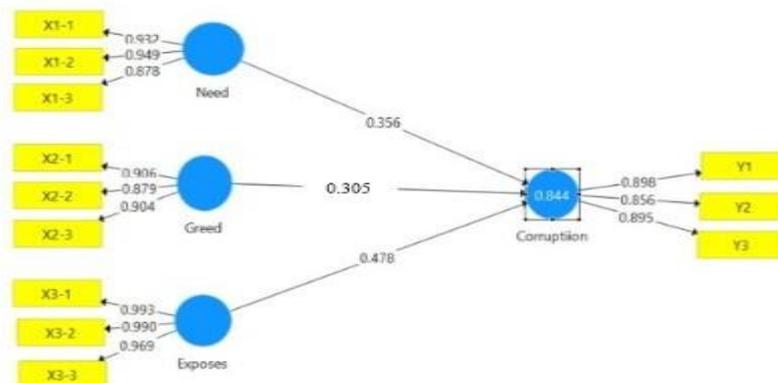
Kriteria jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Hair et al., (2019), yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 5 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah  $20 * 4 = 60$  sampel/responden. Terdapat 100 kuesioner yang disebar ke responden dan yang dapat dikumpul dan diolah sebanyak 93 kuesioner dari 100 responden. Variabel yang diuji adalah aspek kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum sebagai variabel independen (eksogen), perilaku korupsi sebagai variabel dependen (endogen).

Teknik analisis statistik untuk mengukur pengaruh kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum terhadap perilaku korupsi menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling - Partial Least Square* –SEM PLS (Narimawati et al. 2020). Penggunaan pemodelan SEM dalam analisis multivariat karena model ini menguji seberapa cocok teori yang digunakan dengan realitas yang diwakili oleh data (Hair et al. 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil/Result

Uji validitas dengan menganalisis nilai konvergen yaitu mengukur besarnya *loading factor* untuk masing-masing konstruk. *Loading factor* diatas 0,70 sangat direkomendasikan. Hasil analisis menunjukkan nilai semua indikator pada tiap konstruk memperoleh nilai loading indikator > 0.70 sehingga dapat dikatakan valid sebagai pengukur konstraknya. Model *PLS Algorithm* dan loading factor (nilai indikator) selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.



Gambar 1 : Model PLS Algoritma

Tabel 1 : Uji Validitas

Item Pernyataan	Convergen Validity (Validitas $\geq 0,7$ )			
	NEEDS	GREED	EXPOSES	CORRUPTION
1	0,93	0,90	0,99	0,89
2	0,94	0,87	0,99	0,85
3	0,87	0,90	0,96	0,89

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS

Kemudian uji reliabilitas melalui analisis nilai Composite Reliability, Cronbach's Alpha dan Average Variance Extracted (AVE). Nilai Composite Reliability, Cronbach's Alpha dan Average Variance Extracted (AVE) yang tinggi menunjukkan adanya konsistensi yang baik dari setiap indikator dalam variabel laten untuk mengukur variabel tersebut. Kriteria nilai composite reliability, Cronbach's Alpha  $> 0.7$  dan AVE  $> 0.5$  menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki internal konsistensi yang baik. Hasil uji composite reliability dan Cronbach's Alpha menunjukkan semua konstruk memperoleh nilai  $> 0.7$  dan hasil uji AVE menunjukkan semua konstruk memperoleh nilai  $> 0.5$  maka dikatakan memiliki internal konsistensi yang baik. Nilai composite reliability selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Uji *Composite Reliability*, Cronbach's Alpha dan *AVE*

Variabel	Composite Reliability ( $\geq 0,7$ )	Cronbach's Alpha ( $\geq 0,7$ )	Average Variance Extracted (AVE) ( $\geq 0,5$ )
Kebutuhan (Needs)	0,94	0,90	0,84
Keserakahan (Greed)	0,92	0,87	0,80
Rendahnya Supermasi Hukum (Exposes)	0,98	0,98	0,96
Perilaku Korupsi (Corruption)	0,91	0,85	0,78

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS

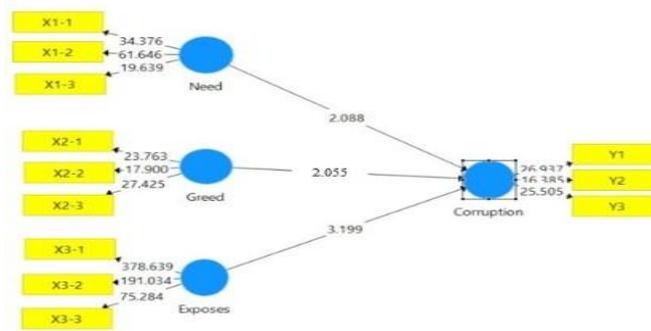
Selanjutnya untuk menguji model struktural dilakukan dengan melihat nilai  $R^2$  (R Square Adjusted) yang merupakan uji *Goodness of the fit*. Konstruk Perilaku korupsi memperoleh nilai sebesar 0.84 yang dapat diinterpretasikan bahwa variasi pada Perilaku korupsi dapat dijelaskan oleh konstruk kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum sebesar 84% ( $0,84 \times 100\%$ ) sedangkan sisanya 16% ( $100\% - 84\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Nilai *goodness of the fit* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Perilaku korupsi	0.84	0.83

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS

Pengukuran path coefficients untuk menentukan signifikansi pengaruh antar konstruk endogen terhadap variabel eksogen dan pengujian hipotesis. Nilai koefisien jalur diukur berkisar -1 hingga +1, hubungan antara kedua konstruk semakin kuat jika mendekati nilai +1, dan lemah mendekati -1 dan pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% jika nilai t-statistic  $> 1.96$  dan p value  $< 0.05$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak (Hair et al., 2017). Nilai t-statistik koefisien pengaruh dari konstruk laten diperoleh dari *PLS Bootstrapping*. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 2 : Model SEM-PLS

Table 4. Pengujian Hipotesis

Effect	Cooffisiens	Standard Deviation	t- statistics	p- values	Hypothesis Test decision
Needs -> Corruption	0,356	0,174	2,088	0.037	H1 Diterima
Greed -> Corrrption	0,305	0,187	2,055	0.042	H2 Diterima
Exposes -> Corruption	0,477	0,149	3,199	0,001	H3 Diterima

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS

Hasil interpretasi dari uji signifikansi analis pengaruh kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supermasi hukum terhadap perilaku korupsi (data pada tabel 4) dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien pengaruh kebutuhan (*need*) terhadap perilaku korupsi sebesar 0,356. Nilai t-statistik 2,088 > 1.96 dan p-value 0.037 < 0.05 sehingga hipotesis (H1) diterima. Hasil ini menyatakan bahwa variabel kebutuhan (*needs*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Nilai koefisien pengaruh keserakahan (*greed*) terhadap perilaku korupsi sebesar 0,305. Nilai t-statistik 2,055 > 1.96 dan p-value 0.042 < 0.05 maka hipotesis (H2) diterima. Hasil ini menyatakan bahwa variabel keserakahan (*greed*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Nilai koefisien pengaruh rendahnya supermasi hukum (*exposes*) terhadap perilaku korupsi sebesar 0,478. Nilai t-statistik 3,199 > 1.96 dan p-value 0.001 < 0.05 maka hipotesis (H3) diterima. Hasil ini menyatakan bahwa variabel rendahnya supermasi hukum (*exposes*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi.

### Pembahasan/ Discussion

#### Pengaruh Kebutuhan (Needs) Terhadap Perilaku Korupsi

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H1) menunjukkan bahwa kebutuhan (*needs*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya, semakin tinggi kebutuhan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan perilaku korupsi. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi ketika individu memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai (Farooq et al.,2013). Ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhannya tetapi alat atau sarana untuk memenuhinya tidak cukup tersedia maka ia mencari cara untuk mendapatkan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut walaupun dengan jalan korupsi misalnya *fraud*. Sebagai upaya untuk mengendalikan kebutuhan sehingga dapat meminimalisir kecenderungan aparatur pemerintah melakukan korupsi, maka ditingkatkan sikap rasa kecukupan atas kebutuhan yang dimilikinya melalui peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pihak pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan aparatur, terutama kebutuhan ekonomi, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

### **Pengaruh Keserakahan (Greed) Terhadap Perilaku Korupsi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) menunjukkan bahwa keserakahan (*greed*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya, semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan perilaku korupsi. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa memburuknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor internal yang berupa keserakahan atau ketamakan, gaya hidup yang konsumtif, dan pendidikan serta moral yang rendah (Kenneth, 2024). Keserakahan merupakan sikap yang tidak puas terhadap apa yang dimiliki, ketidakpuasan terhadap sesuatu yang dimiliki akan mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepuasannya. Orang yang memiliki sikap serakah tidak peduli terhadap kerugian orang lain atas apa yang ia lakukan. Jika sikap serakah ini melekat pada diri aparatur pemerintah maka akan membuatnya bisa melakukan korupsi. Sikap serakah dapat dicegah melalui peningkatan rasa syukur terhadap apa yang dimiliki.

### **Pengaruh Rendahnya Supremasi Hukum (Exposes) Terhadap Perilaku Korupsi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) menunjukkan bahwa rendahnya supremasi hukum (*exposes*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya, semakin rendah tingkat supremasi hukum di suatu negara atau lembaga, semakin meningkat perilaku korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Mungiu-Pippidi (2020) menunjukkan bahwa rendahnya supremasi hukum dapat meningkatkan korupsi dengan cara memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis tanpa konsekuensi. Hukuman yang rendah membuat seseorang tidak jera atas tindakannya, sehingga perilaku korupsi terus dilakukannya. Hukuman yang rendah bukan hanya berdampak terhadap tidak jera pelaku kejahatan, akan tetapi dapat memicu orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu untuk mengurangi perilaku korupsi maka perlu memberikan hukuman atau sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Tujuan yang ingin dicapai adalah menguji dan menganalisis pengaruh kebutuhan, keserakahan dan rendahnya supremasi hukum terhadap perilaku korupsi pada sektor pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan (*needs*), keserakahan (*greed*) dan rendahnya supremasi hukum (*exposes*) berpengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan ekonomi, memberikan hukuman atau sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan moral dalam melakukan tindakan, sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan korupsi meskipun memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Keterbatasan penelitian ini menggunakan desain cross-section dan fokus penelitian pada populasi tertentu yakni hanya pada satu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu tertentu sehingga perlu pengembangan penelitian yang akan datang menggunakan desain longitudinal untuk membangun hubungan sebab akibat dan mengembangkan model penelitian dengan mengeksplorasi faktor-faktor pemoderasi seperti moralitas individu atau mediasi seperti niat perilaku dalam rangka pengembangan teori fraud. Selain itu pengembangan penelitian pada organisasi sektor publik lainnya

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Alfarago, D., Syukur, M., & Maburur, A. 2023. The Likelihood of Fraud from the Fraud Hexagon Perspective: Evidence from Indonesia. *ABAC Journal*, 43 (1): 34-51.
- Bauhr, M. (2012). Need or greed corruption?. In *Good Government*. Edward Elgar Publishing.
- Budiman, N. A. (2018). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Dimensi Fraud Diamond dan Gone

- Theory. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 75–90.  
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8135>
- Creswell, J. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. SAGE Publications India
- Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption impede economic growth in Pakistan?. *Economic Modelling*, 35, 622-633.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., 2019. *Multivariate Data Analysis*, Eighth Edition. Pearson Education, Inc
- Hair, J. F., Hut, G.T. M., Ringle, C.M., Sarstedt, M., 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Second Edition. SAGE Publications, Inc.
- ICW. 2023. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 : Korupsi Lintas Trias Politika
- Isgiyata, J., Indayani, & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 31–42.  
<https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>
- Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2016). Analisa pengaruh teori gone fraud terhadap academic fraud di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 134-142.
- Jamaluddin, M., Habbe, A. H., & Aprilianti, L. (2019, August). Factors Influencing Corruption Actions with Parliamentary Behavior as Moderating Variables (Polewali Mandar Regency DPRD Study). In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 15-26). Atlantis Press.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335-340.
- Kum, M. A. (2023). Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor. *Unes Law Review*, 5(3), 935-951.
- Mungiu-Pippidi, A., & Kukutschka, R. M. B. EU Grant Agreement number: 290529 Project acronym: ANTICORRP Project title: Anti-Corruption Policies Revisited.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Affandi, A., Prianada, S. 2020. *Ragam dan Analisis dalam Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi, PLS, SEM, SMARTPLS, SBSEM, LISREL & AMOS*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Restya, W. P. D. & Amaliah, H. (2019). Corrupt behavior in a psychological perspective. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2), 177-182.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business A Skill-Building Approach, Seventh Edition*. John Wiley & Sons Ltd.
- Stamler, R. T., Marschdorf, H. J., & Possamai, M. 2014. *Fraud Prevention and Detection: Warning Signs and the Red Flag System*. CRC Press.
- Winurini, S. (2017). Perilaku korupsi di Indonesia dalam perspektif teori motivasi. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, IX (03).
- Zimelis, A. (2020). Corruption research: A need for an integrated approach. *International Area Studies Review*, 23(3), 288-306.